

Konstitusi bagi Hidup Bernegara

Hendra Kurniawan

BULAN Agustus di Indonesia identik dengan Bulan Proklamasi. Masyarakat umum sudah mafhum bahwa tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya akan ada serangkaian kegiatan maupun berbagai perlombaan, di samping tentu saja upacara bendera untuk menandai perayaan ini. Akan tetapi sangat jarang masyarakat yang tahu bahwa sehari sesudahnya yaitu tanggal 18 Agustus diperingati pula sebagai Hari Lahirnya Konstitusi.

UUD 1945 disahkan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Saat itulah unsur pokok berdirinya sebuah negara tergenapi. Syarat konstitutif yang harus dipenuhi bagi pembentukan negara selain adanya rakyat dan wilayah ialah pemerintahan yang berdaulat. Di tanggal yang sama, pemerintahan baru dibentuk dengan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemerintahan baru ini menjalankan roda pemerintahan atas dasar konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Inilah ciri khas sebuah negara demokrasi yaitu pemerintahan berjalan di atas rel konstitusi. Di dalamnya berisi aturan-aturan dasar yang dijadikan pedoman bagi pemerintah yang berkuasa agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat. Jika tanpa konstitusi, maka pemerintah bisa berubah otoriter. Konstitusi tidak disusun serta merta, namun melalui proses perjalanan yang panjang. Hal ini disebabkan konstitusi harus menjadi cerminan dari aspirasi dan harapan seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok dan golongan.

Tentu dalam hidup bernegara tidak semua keinginan rakyat terpenuhi. Apalagi dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam seperti di Indonesia ini. Untuk itulah guna menampung sekaligus memadupadankan harapan rakyat disusunlah sebuah konsensus bersama yang diwujudkan dalam se-

buah UUD. Para pendiri bangsa kita sejak awal telah memikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa UUD 1945 ini merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Meskipun harus diakui UUD 1945 disusun dalam keadaan serba darurat karena pertama-tama demi terpenuhinya kelengkapan bagi berdirinya sebuah negara. Inilah yang mendorong lahirnya Badan Konstituante dari hasil Pemilu 1955 untuk merumuskan konstitusi baru. Kenyataannya toh tidak semudah yang dibayangkan, tarik-menarik berbagai kepentingan muncul saat pembahasan, hingga akhirnya keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali pada UUD 1945.

Dinamika perjalanan sejarah konstitusi kita ini menggambarkan bahwa bagaimanapun rumusan *the founding father* Republik ini kenyataannya mampu mewartakan kepentingan dan keanekaragaman rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalaupun pada masa Reformasi terjadi amandemen terhadap UUD 1945, namun tidak sampai mereduksi jiwa dan semangat UUD 1945. Tentu berbeda dengan penerapannya yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dalam praktik kenegaraan. Untuk itulah fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial demi mengawal pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Berbagai aturan dan produk hukum yang ada di bawah UUD 1945 harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sangat disayangkan apabila pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945.

Jangan sampai yang dijadikan tameng adalah aspirasi masyarakat belaka karena pada dasarnya UUD 1945 telah menyerap kehendak rakyat Indonesia dalam kesatuannya sebagai bangsa.

Hidup bernegara tidaklah mudah karena dibutuhkan kesadaran akan keberadaan diri seseorang sebagai aku di antara aku-aku yang lain. Untuk itulah diciptakan sebuah aturan bersama dalam bernegara yaitu konstitusi yang harus ditaati. Menjadi sangatlah absurd apabila ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kehendak rakyat namun mencoba menggerogoti salah satu pilar bangunan negara yaitu UUD 1945. Pemimpin yang bijak harus tunduk pada konstitusi. Ketika pemimpin lebih menuruti tuntutan konstituen maka kepentingan politiklah yang dikedepankan. Politik memang menjadi alat untuk mewujudkan kehidupan bernegara, namun jangan sampai politik itu yang menjadi tujuan. Seorang pemimpin yang negarawan sejati harus bercita-cita mewujudkan tujuan hidup bernegara seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. □ - k.

**) Hendra Kurniawan MPd,*

*Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah
FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*